



**Judul** : Bicara Ruang Kerja dan WC : DPR Ngiri Sama BPK Dan MK  
**Tanggal** : Minggu, 20 Agustus 2017  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 7

## Bicara Ruang Kerja Dan WC DPR Ngiri Sama BPK Dan MK

PARA personel DPR terus berupaya menggalakan wacana pembangunan gedung baru. Jumat kemarin, rombongan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Setjen DPR bergerilya ke Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Maksudnya untuk membandingkan Gedung DPR dengan Gedung BPK dan MK.

Rombongan BURT dipimpin Anton Sihombing. Mereka berkunjung lebih dahulu ke Gedung BPK yang letaknya berseberangan dengan Gedung DPR. Di sana, rombongan disambut Sekjen BPK Hendar Ristriawan.

Dalam pertemuan itu, Anton mengemukakan rasa irinya. Dia menyebut, sistem pengamanan di BPK sangat ketat. Kondisi tersebut beda jauh dengan Gedung DPR, yang semua orang bisa dengan mudah masuk ke dalamnya.

Anton juga mengeluhkan soal ruang kerja. Menurut politisi Golkar ini, ruang kerja para pejabat BPK lebih nyaman dan luas. Kondisi tersebut juga berbeda dengan ruang kerja DPR yang dirasanya sumpek.

Menurutnya, Gedung DPR sudah jauh tertinggal dan tidak sesuai dengan kapasitas daya tampung. "Gedung Nusantara I itu dulu dibangun untuk 800 orang. Sekarang, yang sudah ada 5.000 orang rata-rata lalu lalang," ucapnya.

Anton lalu curhat mengenai kondisi DPR yang sudah memprihatinkan. Bahkan menurutnya fasilitas kamar mandi yang ada saja sudah tidak cukup untuk anggota dewan dan stafnya. "Satu

lantai (Gedung Nusantara I) bisa berisi 40-50 anggota. Dengan stafnya, bisa 300 anggota. Ke kamar mandi saja kita harus antri," keluhnya.

Dari kantor BPK, Anton Cs bergeser ke Gedung MK. Sama seperti di Gedung BPK, Anton juga membanding-bandingkan kondisi kantor para hakim MK dengan kantor Dewan. "MK ini satu lantai untuk 3 hakim dengan luas kira-kira 300 meter. Ini jika kita bandingkan dengan DPR, jauh sekali," kata Anton.

Anton lalu mengutip Peraturan Presiden Nomor 73/2011 yang mengatur ruangan eselon 1 seluas 117 meter persegi. Menurutnya, ruang anggota DPR setidaknya sesuai dengan aturan tersebut. Saat ini, ruangan anggota DPR hanya seluas 28 meter persegi dengan tujuh orang staf dan tenaga ahli. Padahal, jabatan DPR lebih tinggi dari eselon 1, karena DPR setara menteri.

Atas hal ini, dia ingin agar segera ada perluasan gedung DPR. Dia memastikan, perluasan ruangan anggota Dewan akan berimplikasi baik terhadap kinerja Dewan. "Kualitas dan kinerja itu pasti meningkat karena sudah betah di ruangnya. Percayalah," klaimnya.

Dia kemudian menegaskan, permintaan DPR soal gedung baru itu merupakan hal yang memang krusial. "Jadi kita meminta gedung yang baru itu itu adalah kebutuhan yang realitas, bukan kebutuhan yang dibuat-buat. Karena anggota itu maunya nyaman tinggal di kantornya, nyaman menerima tamu di kantornya, dan nyaman bekerja di kantornya," tambah dia. ■ KAL